



BUPATI BOALEMO
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI BOALEMO

NOMOR 03 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOALEMO NOMOR 29 TAHUN 2024
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOALEMO,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan asumsi atas belanja pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sehingga menyebabkan terjadinya pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dalam satu program, antar kegiatan dalam beberapa program, dan antar jenis belanja, maka Peraturan Bupati tentang Nomor 29 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Boalemo Nomor 29 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899)

KABAG HUKUM	DINASISDAK KANTOR	ASS	SEKR	WABUP

- sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-

KABAG HUKUM	DINASISDAK KANTOR	ASE	SEK	WABUP
				

Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972),

KABAG HUKUM	DINAS KANTOR	ASB	SEKDA	WABUP
				

sebagaimana telah diubah beberapa Kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah

KABAG HUKUM	DIREKTOR HUKUM	ASE	SEKDA	WAKUP
				

Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
21. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

KABAG HUKUM	DINAS DAKOT	ASS	SEKDA	WABUP
				

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Pengeluaran Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1777);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran

KABAG HUKUM	DINAS/DAK KANTOR	ASS	SEKDA	WAKUP
				

Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 316);

- 31. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 331);
- 32. Peraturan Bupati Kabupaten Boalemo Nomor 29 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2024 Nomor 29);

- Memperhatikan
- 1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
 - 2. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian rincian alokasi transfer ke Daerah menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 dalam rangka efisiensi belanja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
 - 3. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 453 Tahun 2024 tentang perubahan rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Kesehatan Subjenis Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat dan Makanan dan Subjenis Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas dan Perubahan Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus Nonfisik dana ketahanan Pangan dan Pertanian Subjenis Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOALEMO NOMOR 29 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

KABAG HUKUM	DINASIBADAN KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP
				

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Boalemo Nomor 29 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2024 Nomor 29) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2025 semula sebesar Rp.857.706.086.308,00 (Delapan ratus lima puluh tujuh miliar tujuh ratus enam juta delapan puluh enam ribu tiga ratus delapan rupiah) berkurang sebesar Rp.(60.482.029.000,00) (Enam uluh miliar empat ratus delapan puluh dua juta dua puluh sembilan ribu rupiah) sehingga menjadi Rp.797.224.057.308,00 (Tujuh ratus sembilan puluh tujuh miliar dua ratus dua puluh empat juta lima puluh tujuh ribu tiga ratus delapan rupiah), yang bersumber dari :

- a. Pendapatan Transfer.

2. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1). Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp.776.377,123.000,00 (Tujuh ratus tujuh puluh enam miliar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta seratus dua puluh tiga ribu rupiah) berkurang sebesar Rp.(60.482.029.000,00) (Enam uluh miliar empat ratus delapan puluh dua juta dua puluh sembilan ribu rupiah) sehingga menjadi Rp.715.895.094.000 (Tujuh ratus lima belas miliar delapan ratus sembilan puluh lima juta sembilan puluh empat ribu rupiah) yang terdiri atas :
 - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan/atau
 - b. pendapatan transfer antar daerah;
- (2). Penadapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.762.872.123.000,00 (Tujuh ratus enam puluh dua milyar delapan ratus tujuh puluh dua juta seratus dua puluh tiga ribu rupiah) berkurang sebesar Rp.(60.482.029.000,00) (Enam uluh miliar empat ratus delapan puluh dua juta dua puluh sembilan ribu rupiah) sehingga menjadi Rp.702.390.094.000 (Tujuh ratus dua miliar tiga ratus sembilan puluh juta sembilan puluh empat ribu rupiah);
- (3). Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.13.505.000.000,00 (Tiga belas milyar lima ratus lima juta rupiah).

KABAG HUKUM	DINAS HUKUM	ASIS	SEKPA	WABUP
				

3. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1). Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) direncanakan sebesar Rp.762.872.123.000,00 (Tujuh ratus enam puluh dua milyar delapan ratus tujuh puluh dua juta seratus dua puluh tiga ribu rupiah), berkurang sebesar Rp.(60.482.029.000,00) (Enam puluh miliar empat ratus delapan puluh dua juta dua puluh sembilan ribu rupiah) sehingga menjadi Rp.702.390.094.000 (Tujuh ratus dua miliar tiga ratus sembilan puluh juta sembilan puluh empat ribu rupiah) terdiri dari:
 - a. DBH PPH pasal 21
 - b. DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOP DN
 - c. Dana Alokasi Umum (DAU);
 - d. DAU yang Ditentukan Penggunannya
 - e. Dana Alokasi Khusus (DAK);
 - f. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik;
 - g. Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik;
- (2). DBH PPH pasal 21 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.2.809.956.000,00 (Dua miliar delapan ratus sembilan juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah); berkurang sebesar Rp.84.524.000,00 (Delapan puluh empat juta lima ratus dua puluh empat ribu rupiah) sehingga menjadi Rp.2.725.432.000,00 (Dua miliar tujuh ratus dua puluh lima juta empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
- (3). DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOP DN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 0,00 bertambah sebesar Rp.84.524.000,00 (Delapan puluh empat juta lima ratus dua puluh empat ribu rupiah) sehingga menjadi Rp.84.524.000,00 (Delapan puluh empat juta lima ratus dua puluh empat ribu rupiah);
- (4). Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.478.321.450.000,00 (Empat ratus tujuh puluh delapan milyar tiga ratus dua puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) berkurang sebesar Rp.27.633.185.000,00 (Dua puluh tujuh milyar enam ratus tiga puluh tiga juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah) sehingga menjadi Rp.379.443.941.000,00 (Tiga ratus tujuh puluh Sembilan milyar empat ratus empat puluh tiga juta Sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah);
- (5). DAU yang Ditentukan Penggunannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.98.877.509.000,00

KABAG HUKUM	DINAS/DAIRAH KANTOR	ASS	SEKTA	WABUP
				

(Sembilan puluh delapan miliar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus sembilan ribu rupiah) berkurang sebesar Rp.27.633.185.000,00 (Dua puluh tujuh miliar enam ratus tiga puluh tiga juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah) sehingga menjadi Rp.71.244.324.000,00 (Tujuh puluh satu miliar dua ratus empat puluh empat juta tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah);

- (6). Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.197.237.665.000,00 (Seratus Sembilan puluh tujuh miliar dua ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah) berkurang sebesar Rp.32.848.844.000,00 (Tiga puluh dua miliar delapan ratus empat puluh delapan juta delapan ratus empat puluh empat ribu rupiah) sehingga menjadi Rp.164.388.821.000,00 (Seratus enam puluh empat miliar tiga ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah);
- (7). Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.88.019.110.000,00 (Delapan puluh delapan miliar sembilan belas juta seratus sepuluh ribu rupiah) berkurang sebesar Rp.33.308.174.000,00 (Tiga puluh tiga miliar tiga ratus delapan juta seratus tujuh puluh empat ribu rupiah) sehingga menjadi Rp.54.710.936.000,00 (Lima puluh empat miliar tujuh ratus sepuluh juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
- (8). Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.109.218.555.000,00 (Seratus sembilan miliar dua ratus delapan belas juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) bertambah sebesar Rp.459.330.000,00 (Empat ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp.109.677.885.000,00 (Seratus sembilan miliar enam ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

4. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

Anggaran Belanja Daerah direncanakan sebesar Rp. 857.706.086.308,00 (Delapan ratus lima puluh tujuh miliar tujuh ratus enam juta delapan puluh enam ribu tiga ratus delapan rupiah) berkurang sebesar Rp. 60.482.029.000,00 (Enam puluh miliar empat ratus delapan puluh dua juta dua puluh sembilan ribu rupiah) sehingga menjadi Rp. 797.224.057.308,00 (Tujuh ratus sembilan puluh miliar dua ratus dua puluh empat juta lima puluh tujuh ribu tiga ratus delapan rupiah) yang terdiri atas :

- a. Belanja Operasi
b. Belanja Modal

KABAG HUKUM	DINASIBATAN MANTON	ASIS	SEKDA	WABUP
				

c. Belanja Transfer

5. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1). Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada pasal 13 huruf a direncanakan sebesar Rp. 622.567.521.899,06 (Enam ratus dua puluh dua miliar lima ratus enam puluh tujuh juta lima ratus dua puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu koma nol enam rupiah) berkurang sebesar Rp.59.422.535.488,00 (Lima puluh sembilan miliar empat ratus dua puluh dua juta lima ratus tiga puluh lima ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp. 563.144.986.411,06 (Lima ratus enam puluh tiga miliar seratus empat puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu empat ratus sebelas koma nol enam rupiah) yang terdiri atas :
- a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan jasa;
 - c. Belanja Hibah;
 - d. Belanja Modal;
 - e. Belanja Transfer;
- (2). Belanja Pegawai dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 415.500.447.702,19 (Empat ratus lima belas miliar lima ratus juta empat ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus dua koma sembilan belas rupiah) berkurang sebesar Rp. 26.596.530.673,56 (Dua puluh enam miliar lima ratus Sembilan puluh enam juta lima ratus tiga puluh ribu enam ratus tujuh puluh tiga koma lima puluh enam rupiah) sehingga menjadi Rp. 388.903.917.028,63 (Tiga ratus delapan puluh delapan miliar Sembilan ratus tiga juta Sembilan ratus tujuh belas ribu dua puluh delapan koma enam puluh tiga rupiah);
- (3). Belanja Barang dan Jasa dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.199.207.783.812,87 (Seratus sembilan puluh sembilan miliar dua ratus tujuh juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus dua belas koma delapan puluh tujuh rupiah) berkurang sebesar RP. 31.110.504.814,44 (Tiga puluh satu miliar seratus sepuluh juta lima ratus empat ribu delapan ratus empat belas koma empat puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp. 168.097.278.998,43 (Seratus enam puluh delapan miliar sembilan puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan koma empat puluh tiga rupiah)
- (4). Belanja Hibah dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.7.859.290.384,00 (Tujuh miliar delapan ratus lima puluh sembilan

KABAG HUKUM	DINASISDAN KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP
				

juta dua ratus sembilan puluh ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah) berkurang sebesar Rp.1.715.500.000,00 (Satu miliar tujuh ratus lima belas juta lima ribu rupiah) sehingga menjadi Rp.6.143.790.384,00 (Enam miliar seratus empat puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah);

- (5). Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.114.111.660.632,00 (Seratus empat belas miliar seratus sebelas juta enam ratus enam puluh ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp.1.917.920.488,00 (Satu miliar sembilan ratus tujuh belas juta sembilan ratus dua puluh ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp.116.029.581.120,00 (Seratus enam belas miliar dua puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh satu ribu seratus dua puluh rupiah);
- (6). Belanja Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.120.026.903.776,94 (Seratus dua puluh miliar dua puluh enam juta sembilan ratus tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh enam koma sembilan puluh empat rupiah) berkurang sebesar Rp. 2.977.414.000,00 (Dua miliar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus empat belas ribu rupiah) sehingga menjadi Rp.117.049.489.776,94 (Seratus tujuh belas miliar empat puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh enam koma sembilan puluh empat rupiah);

6. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

PASAL 15

- (1). Anggaran Belanja Pegawai dimaksud pada pasal 14 ayat (2) direncanakan sebesar Rp. 415.500.447.702,19 (Empat ratus lima belas miliar lima ratus juta empat ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus dua koma sembilan belas rupiah) berkurang sebesar Rp. 26.596.530.673,56 (Dua puluh enam miliar lima ratus Sembilan puluh enam juta lima ratus tiga puluh ribu enam ratus tujuh puluh tiga koma lima puluh enam rupiah) sehingga menjadi Rp. 388.903.917.028,63 (Tiga ratus delapan puluh delapan miliar Sembilan ratus tiga juta Sembilan ratus tujuh belas ribu dua puluh delapan koma enam puluh tiga rupiah) terdiri atas :
- a. Belanja Gaji dan Tugangan ASN;
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
 - c. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
 - d. Belanja Pegawai BLUD.

KABAG HUKUM	DINASRADA DANTOR	ASS	SEKDA	WAGUB
				

- (2). Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.281.114.689.596,18 (Dua ratus delapan puluh satu miliar seratus empat belas juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh enam koma delapan belas rupiah) berkurang sebesar Rp.22.941.364.153,56 (Dua puluh dua miliar sembilan ratus empat puluh satu juta tiga ratus enam puluh empat ribu seratus lima puluh tiga koma lima puluh enam rupiah) sehingga menjadi Rp.258.173.325.442,62 (Dua ratus lima puluh delapan miliar seratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus dua puluh lima ribu empat ratus empat puluh dua koma enam puluh dua rupiah);
- (3). Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.96.253.493.397,01 (Sembilan puluh enam miliar dua ratus lima puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh koma kosong satu rupiah) berkurang sebesar Rp.1.000.000.000,00 (Satu miliar rupiah) sehingga menjadi Rp.95.253.493.397,01 (Sembilan puluh lima miliar dua ratus lima puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh koma kosong satu rupiah);
- (4). Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.11.931.429.680,00 (Sebelas miliar sembilan ratus tiga puluh satu juta empat ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh rupiah) bertambah sebesar Rp.372.000.000,00 (Tiga ratus tujuh puluh dua juta rupiah) sehingga menjadi Rp.12.303.429.680,00 (Dua belas miliar tiga ratus tiga juta empat ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh rupiah);
- (5). Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.25.151.578.527,00 (Dua puluh lima miliar seratus lima puluh satu juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus dua puluh tujuh rupiah) berkurang menjadi Rp.3.027.166.520,00 (Tiga miliar dua puluh tujuh juta seratus enam puluh enam ribu lima ratus dua puluh rupiah) sehingga menjadi Rp.22.124.412.007,00 (Dua puluh dua miliar seratus dua puluh empat juta empat ratus dua belas ribu tujuh rupiah).

7. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1). Anggaran Belanja Barang dan Jasa dimaksud pada pasal 14 ayat (3) direncanakan sebesar Rp.199.207.783.812,87 (Seratus sembilan puluh sembilan miliar dua ratus tujuh juta tujuh ratus delapan puluh tiga

KABAG HUKUM	DINASRAJAS KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP
				

ribu delapan ratus dua belas koma delapan puluh tujuh rupiah) berkurang sebesar RP. 31.110.504.814,44 (Tiga puluh satu miliar seratus sepuluh juta lima ratus empat ribu delapan ratus empat belas koma empat puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp. 168.097.278.998,43 (Seratus enam puluh delapan miliar sembilan puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan koma empat puluh tiga rupiah) terdiri atas :

- a. Belanja Barang;
- b. Belanja Jasa;
- c. Belanja Pemeliharaan;
- d. Belanja Perjalanan Dinas;
- e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
- f. Belanja Barang dan Jasa BOSP;
- g. Belanja Barang dan jasa BOK Puskesmas
- h. Belanja Barang dan Jasa BLUD;

- (2). Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.44.726.535.684,19 (Empat puluh empat miliar tujuh ratus dua puluh enam juta lima ratus tiga puluh lima ribu enam ratus delapan puluh empat koma sembilan belas rupiah) berkurang sebesar Rp.9.589.217.817,54 (Sembilan miliar lima ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus tujuh belas ribu delapan ratus tujuh belas koma lima puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp.35.137.317.866,65 (Tiga puluh lima miliar seratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus tujuh belas ribu delapan ratus enam puluh enam koma enam puluh lima rupiah);
- (3). Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 62.690.585.165,68 (Enam puluh dua miliar enam ratus sembilan puluh juta lima ratus delapan puluh lima ribu seratus enam puluh lima koma enam puluh delapan rupiah) berkurang sebesar Rp.5.360.518.875,00 (Lima miliar tiga ratus enam puluh juta lima ratus delapan belas ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp.57.330.066.290,68 (Lima puluh tujuh miliar tiga ratus tiga puluh juta enam puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh koma enam puluh delapan rupiah);
- (4). Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.5.696.728.345,00 (Lima miliar enam ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah) berkurang sebesar Rp.1.729.845.989,00 (Satu

KABAG HUKUM	DINAS/DAIRAH KANTOR	ASB	SEKDA	WABUP
				

miliar tujuh ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi Rp.3.966.882.356,00 (Tiga miliar sembilan ratus enam puluh enam juta delapan ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah);

- (5). Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.27.005.830.967,00 (Dua puluh tujuh miliar lima juta delapan ratus tiga puluh ribu sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah) berkurang sebesar Rp.11.296.402.450,90 (Sebelas miliar dua ratus sembilan puluh enam juta empat ratus dua ribu empat ratus lima puluh koma sembilan puluh rupiah) sehingga menjadi Rp.15.709.428.516,10 (Lima belas miliar tujuh ratus sembilan juta empat ratus dua puluh delapan ribu lima ratus enam belas koma sepuluh rupiah);
- (6). Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.808.865.000,00 (Delapan ratus delapan juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah) bertambah sebesar Rp.10.700.000,00 (Sepuluh juta tujuh ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp.819.565.000,00 (Delapan ratus sembilan belas juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah)
- (7). Belanja Barang dan Jasa BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.21.445.872.000,00 (Dua puluh satu miliar empat ratus empat puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) berkurang sebesar Rp.5.352.128.202,00 (Lima miliar tiga ratus lima puluh dua juta seratus dua puluh delapan ribu dua ratus dua rupiah) sehingga menjadi Rp.16.093.743.798,00 (Enam belas miliar sembilan puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah);
- (8). Belanja Barang dan jasa BOK Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.6.917.154.000,00 (Enam miliar sembilan ratus tujuh belas juta seratus lima puluh empat ribu rupiah) berkurang sebesar Rp.176.110.000,00 (Seratus tujuh puluh enam juta seratus sepuluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp.6.741.044.000,00 (Enam miliar tujuh ratus empat puluh satu juta empat puluh empat ribu rupiah);
- (9). Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.29.916.212.651,00 (Dua puluh sembilan miliar sembilan ratus enam belas juta dua ratus dua belas

KABAG HUKUM	DINASBOM KANTOR	ASS	SEKDA	WAKUP
				

ribu enam ratus lima puluh satu rupiah) bertambah sebesar Rp.2.383.018.520,00 (Dua miliar tiga ratus delapan puluh tiga juta delapan belas ribu lima ratus dua puluh rupiah) sehingga menjadi Rp.32.299.231.171,00 (Tiga puluh dua miliar dua ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh satu ribu seratus tujuh puluh satu rupiah).

8. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1). Anggaran Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada pasal 14 ayat (4) direncanakan sebesar Rp.7.859.290.384,00 (Tujuh miliar delapan ratus lima puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah) berkurang sebesar Rp.1.715.500.000,00 (Satu miliar tujuh ratus lima belas juta lima ribu rupiah) sehingga menjadi Rp.6.143.790.384,00 (Enam miliar seratus empat puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah) terdiri atas :
 - a. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia;
 - b. Belanja Hibah Dana BOSP;
- (2). Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.4.215.000.000,00 (Empat miliar dua ratus lima belas juta rupiah) berkurang sebesar Rp.1.950.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) sehingga menjadi Rp.2.265.000.000,00 (Dua miliar dua ratus enam puluh lima juta rupiah);
- (3). Belanja Hibah Dana BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.2.874.995.000,00 (Dua miliar delapan ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) bertambah sebesar Rp.234.500.000,00 (Dua ratus tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp.3.109.495.000,00 (Tiga miliar seratus sembilan juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

9. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

- (1). Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada pasal 14 ayat (5) direncanakan sebesar Rp.114.111.660.632,00 (Seratus empat belas miliar seratus sebelas juta enam ratus enam puluh ribu enam ratus

KABAG HUKUM	DINAS/BAHAN SANTOR	ASS	SEKDA	WABUP
				

tiga puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp.1.917.920.488,00 (Satu miliar sembilan ratus tujuh belas juta sembilan ratus dua puluh ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp.116.029.581.120,00 (Seratus enam belas miliar dua puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh satu ribu seratus dua puluh rupiah) terdiri atas :

- a. Belanja Modal Tanah;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi;
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya dan/atau;
 - f. Belanja Modal Aset Lainnya.
- (2.) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.0,00 (Nol Rupiah) bertambah sebesar Rp.2.200.000.000,00 (Dua miliar dua ratus juta rupiah) sehingga menjadi Rp.2.200.000.000,00 (Dua miliar dua ratus juta rupiah);
- (3.) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.35.022.160.600,00 (Tiga puluh lima miliar dua puluh dua juta seratus enam puluh ribu enam ratus rupiah) bertambah sebesar Rp.5.597.691.284,00 (Lima miliar lima ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp.40.619.851.884,00 (Empat puluh miliar enam ratus sembilan belas juta delapan ratus lima puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah);
- (4.) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.34.947.626.032,00 (Tiga puluh empat miliar sembilan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus dua puluh enam ribu tiga puluh rupiah) bertambah sebesar Rp.5.223.679.776,00 (Lima miliar dua ratus dua puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah) sehingga menjadi Rp.40.171.305.808,00 (Empat puluh miliar seratus tujuh puluh satu juta tiga ratus lima ribu delapan ratus delapan rupiah);
- (5.) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.43.951.874.000,00 (Empat puluh tiga miliar sembilan ratus lima puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) berkurang sebesar Rp.13.231.483.000,00 (Tiga belas miliar dua ratus tiga puluh satu juta empat ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) sehingga menjadi

KABAG HUKUM	DINAS/BAKOR PONTOR	ASB	SEWA	WABUP
				

Rp.30.720.391.000,00 (Tiga puluh miliar tujuh ratus dua puluh juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

- (6). Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.0,00 (Nol rupiah) bertambah sebesar Rp. 2.204.282.428,00 (Dua miliar dua ratus empat juta dua ratus delapan puluh dua ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp. 2.204.282.428,00 (Dua miliar dua ratus empat juta dua ratus delapan puluh dua ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah);
- (7). Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) berkurang sebesar Rp.76.250.000,00 (Tujuh puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp.113.750.000,00 (Seratus tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

10. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

- (1). Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud pada pasal 14 ayat (6) direncanakan sebesar Rp. Rp.120.026.903.776,94 (Seratus dua puluh miliar dua puluh enam juta sembilan ratus tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh enam koma sembilan puluh empat rupiah) berkurang sebesar Rp. 2.977.414.000,00 (Dua miliar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus empat belas ribu rupiah) sehingga menjadi Rp.117.049.489.776,94 (Seratus tujuh belas miliar empat puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh enam koma sembilan puluh empat rupiah) terdiri atas :
- a. Belanja Bagi hasil dan/atau;
- b. Belanja Bantuan Keuangan.
- (2) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.118.553.340.654,00 (Seratus delapan belas miliar lima ratus lima puluh tiga juta tiga ratus empat puluh ribu enam ratus lima puluh empat rupiah) berkurang sebesar Rp.2.977.414.000,00 (Dua miliar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus empat belas ribu rupiah) sehingga menjadi Rp.115.575.926.654,00 (Seratus lima belas miliar lima ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus dua puluh enam ribu enam ratus lima puluh empat rupiah).

KABAG HUKUM	DINASIBADAN KANTOR	ASB	SEKDA	WABUP
				

11. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28

Pelaksanaan penjabaran Perubahan APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

12. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 29

Peraturan Bupati Kabupaten Boalemo ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boalemo.

Ditetapkan di Tilamuta

Pada Tanggal 24 Maret 2025

BUPATI BOALEMO,

RUM PAGAU

Diundangkan di Tilamuta
pada Tanggal 24 Maret 2025
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOALEMO

SHERMAN MORIDU

(BERITA DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2025 NOMOR 03)



KABUPATEN BOALEMO
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS,
OBJEK, RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
4	PENDAPATAN DAERAH			
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	81.228.963.308,00	81.228.963.308,00	0,00
4.1.01	Pajak Daerah	12.919.391.229,44	12.919.391.229,44	0,00
4.1.01.09	Pajak Reklame	204.000.000,00	204.000.000,00	0,00
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	165.000.000,00	165.000.000,00	0,00
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	165.000.000,00	165.000.000,00	0,00
4.1.01.09.02	Pajak Reklame Kain	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00
4.1.01.09.02.0001	Pajak Reklame Kain	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00
4.1.01.09.03	Pajak Reklame Melekat/Stiker	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
4.1.01.09.03.0001	Pajak Reklame Melekat/Stiker	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
4.1.01.13	Pajak Sarang Burung Walet	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00
4.1.01.13.01	Pajak Sarang Burung Walet	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00
4.1.01.13.01.0001	Pajak Sarang Burung Walet	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.228.800.000,00	1.228.800.000,00	0,00
4.1.01.14.12	Pajak Granit/Andesit	765.500.000,00	765.500.000,00	0,00
4.1.01.14.12.0001	Pajak Granit/Andesit	765.500.000,00	765.500.000,00	0,00
4.1.01.14.23	Pajak Pasir dan Kerikil	259.300.000,00	259.300.000,00	0,00
4.1.01.14.23.0001	Pajak Pasir dan Kerikil	259.300.000,00	259.300.000,00	0,00
4.1.01.14.24	Pajak Pasir Kuarsa	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00
4.1.01.14.24.0001	Pajak Pasir Kuarsa	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00
4.1.01.14.29	Pajak Tanah Diatome	160.000.000,00	160.000.000,00	0,00
4.1.01.14.29.0001	Pajak Tanah Diatome	160.000.000,00	160.000.000,00	0,00
4.1.01.14.30	Pajak Tanah Liat	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00
4.1.01.14.30.0001	Pajak Tanah Liat	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00
4.1.01.14.37	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	100.000,00	100.000,00	0,00
4.1.01.14.37.0001	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	100.000,00	100.000,00	0,00
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	1.580.818.715,00	1.580.818.715,00	0,00
4.1.01.15.01	PBBP2	1.580.818.715,00	1.580.818.715,00	0,00
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	1.580.818.715,00	1.580.818.715,00	0,00
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	299.548.800,00	299.548.800,00	0,00
4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	157.548.800,00	157.548.800,00	0,00

KABAG HUKUM	DINASRADA KANTOR	ASB	SEKDA	WABUP

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
4.1.01.16.01.0001	BPHTB-Pemindahan Hak	157.548.800,00	157.548.800,00	0,00
4.1.01.16.02	BPHTB-Pemberian Hak Baru	142.000.000,00	142.000.000,00	0,00
4.1.01.16.02.0001	BPHTB-Pemberian Hak Baru	142.000.000,00	142.000.000,00	0,00
4.1.01.19	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	4.410.806.000,00	4.410.806.000,00	0,00
4.1.01.19.01	PBJT-Makanan dan/atau Minuman	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00
4.1.01.19.01.0001	PBJT-Restoran	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
4.1.01.19.01.0002	PBJT-Penyedia Jasa Boga atau Katering	450.000.000,00	450.000.000,00	0,00
4.1.01.19.02	PBJT-Tenaga Listrik	3.750.780.000,00	3.750.780.000,00	0,00
4.1.01.19.02.0001	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	3.750.780.000,00	3.750.780.000,00	0,00
4.1.01.19.03	PBJT-Jasa Perhotelan	147.186.000,00	147.186.000,00	0,00
4.1.01.19.03.0001	PBJT-Hotel	51.678.000,00	51.678.000,00	0,00
4.1.01.19.03.0003	PBJT-Vila	48.732.000,00	48.732.000,00	0,00
4.1.01.19.03.0009	PBJT-Rumah Penginapan/Guesthouse/Bungalo/Resort/Cottage	46.776.000,00	46.776.000,00	0,00
4.1.01.19.05	PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan	12.840.000,00	12.840.000,00	0,00
4.1.01.19.05.0006	PBJT-Pertunjukan Sirkus, Akrobat, dan Sulap	7.440.000,00	7.440.000,00	0,00
4.1.01.19.05.0009	PBJT-Olahraga Permainan dengan Menggunakan Tempat/Ruang dan/atau Peralatan dan Perlengkapan untuk Olahraga dan Kebugaran	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00
4.1.01.19.05.0010	PBJT-Rekreasi Wahana Air, Wahana Ekologi, Wahana Pendidikan, Wahana Budaya, Wahana Salju, Wahana Permainan, Pemancingan, Agrowisata, dan Kebun Binatang	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
4.1.01.20	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	2.690.325.898,26	2.690.325.898,26	0,00
4.1.01.20.01	Opsen PKB	2.690.325.898,26	2.690.325.898,26	0,00
4.1.01.20.01.0001	Opsen PKB	2.690.325.898,26	2.690.325.898,26	0,00
4.1.01.21	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	2.499.891.816,18	2.499.891.816,18	0,00
4.1.01.21.01	Opsen BBNKB	2.499.891.816,18	2.499.891.816,18	0,00
4.1.01.21.01.0001	Opsen BBNKB	2.499.891.816,18	2.499.891.816,18	0,00
4.1.02	Retribusi Daerah	1.816.240.000,00	1.816.240.000,00	0,00
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	855.000.000,00	855.000.000,00	0,00
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	85.000.000,00	85.000.000,00	0,00
4.1.02.01.01.0006	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis	85.000.000,00	85.000.000,00	0,00
4.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00
4.1.02.01.04.0001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00
4.1.02.01.05	Retribusi Pelayanan Pasar	620.000.000,00	620.000.000,00	0,00
4.1.02.01.05.0001	Retribusi Pelataran	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00
4.1.02.01.05.0002	Retribusi Los	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00

KABAG
HUKUM

DINASADAN
MINTOR

ASS

SEKDA

KABUP

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	691.240.000,00	691.240.000,00	0,00
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	196.600.000,00	196.600.000,00	0,00
4.1.02.02.01.0001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	31.000.000,00	31.000.000,00	0,00
4.1.02.02.01.0005	Retribusi Pemakaian Ruangan	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00
4.1.02.02.01.0006	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
4.1.02.02.01.0007	Retribusi Pemakaian Alat	128.100.000,00	128.100.000,00	0,00
4.1.02.02.02	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
4.1.02.02.02.0001	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir Berbagai Jenis Barang yang Dikontrakkan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
4.1.02.02.03	Retribusi Tempat Pelelangan	110.000.000,00	110.000.000,00	0,00
4.1.02.02.03.0001	Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan	110.000.000,00	110.000.000,00	0,00
4.1.02.02.09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	334.640.000,00	334.640.000,00	0,00
4.1.02.02.09.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	334.640.000,00	334.640.000,00	0,00
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	270.000.000,00	270.000.000,00	0,00
4.1.02.03.07	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	270.000.000,00	270.000.000,00	0,00
4.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	270.000.000,00	270.000.000,00	0,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.000.000.000,00	7.000.000.000,00	0,00
4.1.03.03	Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta	7.000.000.000,00	7.000.000.000,00	0,00
4.1.03.03.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta	7.000.000.000,00	7.000.000.000,00	0,00
4.1.03.03.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta	7.000.000.000,00	7.000.000.000,00	0,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	59.493.332.078,56	59.493.332.078,56	0,00
4.1.04.05	Jasa Giro	1.100.000.000,00	1.100.000.000,00	0,00
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00
4.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00
4.1.04.05.02	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
4.1.04.05.02.0001	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
4.1.04.07	Pendapatan Bunga	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00
4.1.04.07.01	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00
4.1.04.07.01.0001	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00
4.1.04.08	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	1.445.463.000,00	1.445.463.000,00	0,00
4.1.04.08.01	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	1.445.463.000,00	1.445.463.000,00	0,00

KABAG HUKUM	DINAS DAERAH KANTOR	ASST	SEKDA	WABUP
				

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
4.1.04.08.01.0001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	1.445.463.000,00	1.445.463.000,00	0,00
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	56.447.869.078,56	56.447.869.078,56	0,00
4.1.04.16.02	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	33.840.635.740,00	33.840.635.740,00	0,00
4.1.04.16.02.0001	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	33.840.635.740,00	33.840.635.740,00	0,00
4.1.04.16.04	Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain	22.428.330.138,56	22.428.330.138,56	0,00
4.1.04.16.04.0001	Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain	22.428.330.138,56	22.428.330.138,56	0,00
4.1.04.16.05	Pendapatan BLUD dari APBD	118.603.200,00	118.603.200,00	0,00
4.1.04.16.05.0001	Pendapatan BLUD dari APBD	118.603.200,00	118.603.200,00	0,00
4.1.04.16.06	Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah	60.300.000,00	60.300.000,00	0,00
4.1.04.16.06.0001	Pendapatan BLUD dari Jasa Giro	60.300.000,00	60.300.000,00	0,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	776.377.123.000,00	715.895.094.000,00	-60.482.029.000,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	762.872.123.000,00	702.390.094.000,00	-60.482.029.000,00
4.2.01.05	Dana Desa	69.679.459.000,00	69.679.459.000,00	0,00
4.2.01.05.01	Dana Desa	69.679.459.000,00	69.679.459.000,00	0,00
4.2.01.05.01.0001	Dana Desa	69.679.459.000,00	69.679.459.000,00	0,00
4.2.01.06	Insentif Fiskal	8.830.378.000,00	8.830.378.000,00	0,00
4.2.01.06.02	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya	8.830.378.000,00	8.830.378.000,00	0,00
4.2.01.06.02.0001	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya	8.830.378.000,00	8.830.378.000,00	0,00
4.2.01.07	Dana Bagi Hasil (DBH)	8.803.171.000,00	8.803.171.000,00	0,00
4.2.01.07.01	DBH Pajak	5.139.602.000,00	5.139.602.000,00	0,00
4.2.01.07.01.0001	DBH PBB	2.329.646.000,00	2.329.646.000,00	0,00
4.2.01.07.01.0002	DBH PPh Pasal 21	2.809.956.000,00	2.725.432.000,00	-84.524.000,00
4.2.01.07.01.0003	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	0,00	84.524.000,00	84.524.000,00
4.2.01.07.02	DBH Sumber Daya Alam (SDA)	1.522.614.000,00	1.522.614.000,00	0,00
4.2.01.07.02.0004	DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent	10.036.000,00	10.036.000,00	0,00
4.2.01.07.02.0006	DBH SDA Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	269.389.000,00	269.389.000,00	0,00
4.2.01.07.02.0009	DBH SDA Perikanan	1.243.189.000,00	1.243.189.000,00	0,00
4.2.01.07.03	DBH Lainnya	2.140.955.000,00	2.140.955.000,00	0,00
4.2.01.07.03.0001	DBH Sawit	2.140.955.000,00	2.140.955.000,00	0,00
4.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	478.321.450.000,00	450.688.265.000,00	-27.633.185.000,00
4.2.01.08.01	DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya	379.443.941.000,00	379.443.941.000,00	0,00
4.2.01.08.01.0001	DAU	379.443.941.000,00	379.443.941.000,00	0,00
4.2.01.08.02	DAU yang Ditentukan Penggunaannya	98.877.509.000,00	71.244.324.000,00	-27.633.185.000,00

KABAG HUKUM	DINAS DAERAH KANTOR	ABB	SEKDA	WABUP

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
4.2.01.08.02.0003	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	2.323.138.000,00	2.323.138.000,00	0,00
4.2.01.08.02.0004	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	41.249.851.000,00	41.249.851.000,00	0,00
4.2.01.08.02.0005	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	27.671.335.000,00	27.671.335.000,00	0,00
4.2.01.08.02.0006	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	27.633.185.000,00	0,00	-27.633.185.000,00
4.2.01.09	Dana Alokasi Khusus (DAK)	197.237.665.000,00	164.388.821.000,00	-32.848.844.000,00
4.2.01.09.01	DAK Fisik	88.019.110.000,00	54.710.936.000,00	-33.308.174.000,00
4.2.01.09.01.0066	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-PAUD	1.947.332.000,00	1.947.332.000,00	0,00
4.2.01.09.01.0075	DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penguatan Sistem Kesehatan	52.763.604.000,00	52.763.604.000,00	0,00
4.2.01.09.01.0077	DAK Fisik-Bidang Jalan-Jalan Mendukung Konektivitas Daerah	33.308.174.000,00	0,00	-33.308.174.000,00
4.2.01.09.02	DAK Non Fisik	109.218.555.000,00	109.677.885.000,00	459.330.000,00
4.2.01.09.02.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	59.000.972.000,00	59.000.972.000,00	0,00
4.2.01.09.02.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	710.250.000,00	710.250.000,00	0,00
4.2.01.09.02.0006	DAK Non Fisik-TKG PNSD	4.017.263.000,00	4.017.263.000,00	0,00
4.2.01.09.02.0022	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	505.690.000,00	505.690.000,00	0,00
4.2.01.09.02.0026	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Reguler	18.700.612.000,00	18.700.612.000,00	0,00
4.2.01.09.02.0027	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Kinerja	1.374.000.000,00	1.374.000.000,00	0,00
4.2.01.09.02.0028	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler	4.181.660.000,00	4.181.660.000,00	0,00
4.2.01.09.02.0029	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00
4.2.01.09.02.0030	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	375.320.000,00	375.320.000,00	0,00
4.2.01.09.02.0031	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00
4.2.01.09.02.0033	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	7.316.992.000,00	7.316.992.000,00	0,00
4.2.01.09.02.0034	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Pengawasan Obat dan Makanan	296.748.000,00	296.748.000,00	0,00
4.2.01.09.02.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	9.114.248.000,00	9.114.248.000,00	0,00
4.2.01.09.02.0039	DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Keluarga Berencana	3.489.800.000,00	3.489.800.000,00	0,00
4.2.01.09.02.0044	DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian	0,00	459.330.000,00	459.330.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	13.505.000.000,00	13.505.000.000,00	0,00
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	13.505.000.000,00	13.505.000.000,00	0,00
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	13.505.000.000,00	13.505.000.000,00	0,00
4.2.02.01.01.0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	6.500.000.000,00	6.500.000.000,00	0,00
4.2.02.01.01.0004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00

KABAG HUKUM	DINASBADAN PANTOR	ASB	SEKDA	WABUP
				

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
4.2.02.01.01.0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	7.000.000.000,00	7.000.000.000,00	0,00
	Jumlah Pendapatan	857.606.086.308,00	797.124.057.308,00	-60.482.029.000,00
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI	622.567.521.899,06	563.144.986.411,06	-59.422.535.488,00
5.1.01	Belanja Pegawai	415.500.447.702,19	388.903.917.028,63	-26.596.530.673,56
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	281.114.689.596,18	258.173.325.442,62	-22.941.364.153,56
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	210.115.239.633,88	190.668.458.746,01	-19.446.780.887,87
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	164.618.146.117,88	146.051.302.666,01	-18.566.843.451,87
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	45.497.093.516,00	44.617.156.080,00	-879.937.436,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	19.559.073.511,54	18.160.395.745,45	-1.398.677.766,09
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	15.620.452.610,22	14.275.632.492,45	-1.344.820.117,77
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	3.938.620.901,32	3.884.763.253,00	-53.857.648,32
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	4.013.684.912,00	3.627.689.162,00	-385.995.750,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	4.013.684.912,00	3.627.689.162,00	-385.995.750,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	16.545.565.700,00	15.551.992.050,00	-993.573.650,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	12.043.438.700,00	11.137.285.250,00	-906.153.450,00
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	4.502.127.000,00	4.414.706.800,00	-87.420.200,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	2.186.698.858,00	2.056.902.225,00	-129.796.633,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	2.165.698.858,00	2.035.902.225,00	-129.796.633,00
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	11.965.721.607,00	11.098.491.420,30	-867.230.186,70
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	9.236.721.644,20	8.415.843.154,30	-820.878.489,90
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	2.728.999.962,80	2.682.648.266,00	-46.351.696,80
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	238.692.633,46	234.565.352,85	-4.127.280,61
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	238.692.633,46	234.565.352,85	-4.127.280,61
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	3.132.516,30	2.672.196,01	-460.320,29
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	2.509.374,98	2.046.460,01	-462.914,97
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	623.141,32	625.736,00	2.594,68
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	14.558.427.054,00	14.843.705.375,00	285.278.321,00
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	12.440.778.612,00	12.726.056.933,00	285.278.321,00
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	2.117.648.442,00	2.117.648.442,00	0,00
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	482.114.276,00	482.114.276,00	0,00
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	374.861.466,00	374.861.466,00	0,00
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	107.252.810,00	107.252.810,00	0,00
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	1.446.338.894,00	1.446.338.894,00	0,00
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	1.124.592.322,00	1.124.592.322,00	0,00
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	321.746.572,00	321.746.572,00	0,00

KABAG HUKUM	DINAS/DA TOR	ASST	SEKDA	WABUP

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	96.253.493.397,01	95.253.493.397,01	-1.000.000.000,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	6.281.904.546,00	5.281.904.546,00	-1.000.000.000,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	6.281.904.546,00	5.281.904.546,00	-1.000.000.000,00
5.1.01.02.04	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	2.805.900.000,00	2.805.900.000,00	0,00
5.1.01.02.04.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	2.805.900.000,00	2.805.900.000,00	0,00
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	21.360.979.498,01	21.360.979.498,01	0,00
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	21.360.979.498,01	21.360.979.498,01	0,00
5.1.01.02.06	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	65.804.709.353,00	65.804.709.353,00	0,00
5.1.01.02.06.0006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Hotel	4.930.731,00	4.930.731,00	0,00
5.1.01.02.06.0007	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Restoran	16.750.000,00	16.750.000,00	0,00
5.1.01.02.06.0008	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Hiburan	430.140,00	430.140,00	0,00
5.1.01.02.06.0009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Reklame	6.834.000,00	6.834.000,00	0,00
5.1.01.02.06.0010	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Penerangan Jalan	125.651.130,00	125.651.130,00	0,00
5.1.01.02.06.0013	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Sarang Burung Walet	174.200,00	174.200,00	0,00
5.1.01.02.06.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	41.164.800,00	41.164.800,00	0,00
5.1.01.02.06.0015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	52.957.427,00	52.957.427,00	0,00
5.1.01.02.06.0016	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	10.034.885,00	10.034.885,00	0,00
5.1.01.02.06.0022	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan	2.847.500,00	2.847.500,00	0,00
5.1.01.02.06.0026	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	20.770.000,00	20.770.000,00	0,00
5.1.01.02.06.0035	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	2.365.100,00	2.365.100,00	0,00
5.1.01.02.06.0036	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	1.675.000,00	1.675.000,00	0,00
5.1.01.02.06.0037	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Tempat Pelelangan	3.685.000,00	3.685.000,00	0,00

KABAG HUKUM	DINASBADA MANTOR	ASD	SEKDA	WABUP
				

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.1.01.02.06.0043	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga	11.210.440,00	11.210.440,00	0,00
5.1.01.02.06.0050	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung	9.045.000,00	9.045.000,00	0,00
5.1.01.02.06.0064	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	59.000.972.000,00	59.000.972.000,00	0,00
5.1.01.02.06.0065	Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	4.017.263.000,00	4.017.263.000,00	0,00
5.1.01.02.06.0066	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	710.250.000,00	710.250.000,00	0,00
5.1.01.02.06.0067	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	1.765.699.000,00	1.765.699.000,00	0,00
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	11.931.429.680,00	12.303.429.680,00	372.000.000,00
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	567.032.838,00	567.032.838,00	0,00
5.1.01.04.01.0001	Belanja Uang Representasi DPRD	567.032.838,00	567.032.838,00	0,00
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	82.363.400,00	82.363.400,00	0,00
5.1.01.04.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	82.363.400,00	82.363.400,00	0,00
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	92.888.320,00	92.888.320,00	0,00
5.1.01.04.03.0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	92.888.320,00	92.888.320,00	0,00
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	72.132.000,00	72.132.000,00	0,00
5.1.01.04.04.0001	Belanja Uang Paket DPRD	72.132.000,00	72.132.000,00	0,00
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	842.233.000,00	842.233.000,00	0,00
5.1.01.04.05.0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	842.233.000,00	842.233.000,00	0,00
5.1.01.04.07	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	103.657.200,00	103.657.200,00	0,00
5.1.01.04.07.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	103.657.200,00	103.657.200,00	0,00
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	1.890.000.000,00	1.890.000.000,00	0,00
5.1.01.04.08.0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	1.890.000.000,00	1.890.000.000,00	0,00
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	472.500.000,00	472.500.000,00	0,00
5.1.01.04.09.0001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	472.500.000,00	472.500.000,00	0,00
5.1.01.04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	111.102.922,00	111.102.922,00	0,00
5.1.01.04.10.0001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	111.102.922,00	111.102.922,00	0,00
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	3.943.360.000,00	4.315.360.000,00	372.000.000,00
5.1.01.04.12.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
5.1.01.04.12.0004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	3.893.360.000,00	4.265.360.000,00	372.000.000,00
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	3.704.160.000,00	3.704.160.000,00	0,00
5.1.01.04.13.0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	3.704.160.000,00	3.704.160.000,00	0,00
5.1.01.04.14	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00

KABAG HUKUM	DINAS/BAGIAN HANTOR	ASS	SEKDA	WABUP
				

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.1.01.04.14.0001	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	338.376.502,00	338.376.502,00	0,00
5.1.01.05.01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	58.246.500,00	58.246.500,00	0,00
5.1.01.05.01.0001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	58.246.500,00	58.246.500,00	0,00
5.1.01.05.02	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	8.154.510,00	8.154.510,00	0,00
5.1.01.05.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	8.154.510,00	8.154.510,00	0,00
5.1.01.05.03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	104.843.700,00	104.843.700,00	0,00
5.1.01.05.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	104.843.700,00	104.843.700,00	0,00
5.1.01.05.04	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	8.652.740,00	8.652.740,00	0,00
5.1.01.05.04.0001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	8.652.740,00	8.652.740,00	0,00
5.1.01.05.05	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	976.971,00	976.971,00	0,00
5.1.01.05.05.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	976.971,00	976.971,00	0,00
5.1.01.05.06	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	2.958,00	2.958,00	0,00
5.1.01.05.06.0001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	2.958,00	2.958,00	0,00
5.1.01.05.10	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	127.531.163,00	127.531.163,00	0,00
5.1.01.05.10.0006	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hotel	2.428.569,00	2.428.569,00	0,00
5.1.01.05.10.0007	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Restoran	8.250.000,00	8.250.000,00	0,00
5.1.01.05.10.0008	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hiburan	211.860,00	211.860,00	0,00
5.1.01.05.10.0009	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame	3.366.000,00	3.366.000,00	0,00
5.1.01.05.10.0010	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	61.887.870,00	61.887.870,00	0,00
5.1.01.05.10.0013	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet	85.800,00	85.800,00	0,00
5.1.01.05.10.0014	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	20.275.000,00	20.275.000,00	0,00
5.1.01.05.10.0015	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	26.083.509,00	26.083.509,00	0,00
5.1.01.05.10.0016	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	4.942.555,00	4.942.555,00	0,00
5.1.01.05.11	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH	29.967.960,00	29.967.960,00	0,00
5.1.01.05.11.0001	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan	1.402.500,00	1.402.500,00	0,00
5.1.01.05.11.0004	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	2.475.000,00	2.475.000,00	0,00

KABAG HUKUM	DIREKTOR	ASST	SEKDA	WABUP
				

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.1.01.05.11.0005	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	10.230.000,00	10.230.000,00	0,00
5.1.01.05.11.0014	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	3.243.900,00	3.243.900,00	0,00
5.1.01.05.11.0015	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	825.000,00	825.000,00	0,00
5.1.01.05.11.0016	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Pelelangan	1.815.000,00	1.815.000,00	0,00
5.1.01.05.11.0022	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga	5.521.560,00	5.521.560,00	0,00
5.1.01.05.11.0031	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung	4.455.000,00	4.455.000,00	0,00
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	710.880.000,00	710.880.000,00	0,00
5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	110.880.000,00	110.880.000,00	0,00
5.1.01.06.01.0001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	110.880.000,00	110.880.000,00	0,00
5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00
5.1.01.06.02.0001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	25.151.578.527,00	22.124.412.007,00	-3.027.166.520,00
5.1.01.99.99	Belanja Pegawai BLUD	25.151.578.527,00	22.124.412.007,00	-3.027.166.520,00
5.1.01.99.99.9999	Belanja Pegawai BLUD	25.151.578.527,00	22.124.412.007,00	-3.027.166.520,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	199.207.783.812,87	168.097.278.998,43	-31.110.504.814,44
5.1.02.01	Belanja Barang	44.726.535.684,19	35.137.317.866,65	-9.589.217.817,54
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	44.476.535.684,19	34.887.317.866,65	-9.589.217.817,54
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	26.906.000,00	94.833.000,00	67.927.000,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1.647.917.095,00	1.112.826.916,00	-535.090.179,00
5.1.02.01.01.0007	Belanja Bahan-Barang dalam Proses	74.295.000,00	51.248.000,00	-23.047.000,00
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	48.750.000,00	129.250.000,00	80.500.000,00
5.1.02.01.01.0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	3.136.000,00	3.136.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	3.715.200,00	762.800,00	-2.952.400,00
5.1.02.01.01.0011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	504.536.000,00	159.436.000,00	-345.100.000,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	4.065.680.130,00	4.136.811.041,00	71.130.911,00
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	298.249.605,00	299.308.790,00	1.059.185,00
5.1.02.01.01.0022	Belanja Suku Cadang-Persediaan dari Belanja Bantuan Sosial	17.772.000,00	17.772.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	3.718.925,00	3.718.925,00	0,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	745.395.590,28	467.780.928,28	-277.614.662,00

KABAG HUKUM	DINASISDAK KANTOR	SS	SEKDA	WABUP
2	9	6	6	9

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	576.721.020,00	407.276.826,40	-169.444.193,60
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	1.272.199.186,91	938.828.493,47	-333.370.693,44
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	90.592.750,00	70.290.363,00	-20.302.387,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	420.244.914,00	233.611.541,25	-186.633.372,75
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	233.390.026,00	322.009.498,25	88.619.472,25
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	198.629.235,00	269.917.342,00	71.288.107,00
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	0,00	210.000.000,00	210.000.000,00
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olahraga	4.600.000,00	454.600.000,00	450.000.000,00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	58.506.300,00	65.657.500,00	7.151.200,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	52.671.000,00	38.464.568,00	-14.206.432,00
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	1.504.891.440,00	1.558.962.459,00	54.071.019,00
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	12.976.926.956,00	12.388.799.500,00	-588.127.456,00
5.1.02.01.01.0040	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	1.100.000.000,00	2.610.500.000,00	1.510.500.000,00
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	2.138.754.851,00	1.386.398.160,00	-752.356.691,00
5.1.02.01.01.0046	Belanja Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Biologi	0,00	1.150.000,00	1.150.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.873.719.300,00	4.163.626.715,00	-2.710.092.585,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	1.651.616.160,00	974.093.500,00	-677.522.660,00
5.1.02.01.01.0055	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	5.461.996.000,00	192.678.000,00	-5.269.318.000,00
5.1.02.01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	1.536.120.000,00	1.036.120.000,00	-500.000.000,00
5.1.02.01.01.0057	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	8.800.000,00	8.800.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	269.535.000,00	269.499.000,00	-36.000,00
5.1.02.01.01.0059	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	94.200.000,00	233.350.000,00	139.150.000,00
5.1.02.01.01.0061	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	27.450.000,00	27.450.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	63.450.000,00	55.950.000,00	-7.500.000,00
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	53.750.000,00	98.000.000,00	44.250.000,00
5.1.02.01.01.0066	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	60.000.000,00	50.000.000,00	-10.000.000,00
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	115.600.000,00	76.000.000,00	-39.600.000,00

KABAG HUKUM	DINAS/DAIRAH KANTOR	ASS	SEKDA	WAGUP
				

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	5.200.000,00	4.000.000,00	-1.200.000,00
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	186.900.000,00	164.400.000,00	-22.500.000,00
5.1.02.01.04	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00
5.1.02.01.04.0111	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat-Alat Peternakan	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	62.690.585.165,68	57.330.066.290,68	-5.360.518.875,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	41.009.130.015,68	40.286.309.332,68	-722.820.683,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	2.810.550.000,00	1.833.300.000,00	-977.250.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	1.485.100.000,00	1.219.497.500,00	-265.602.500,00
5.1.02.02.01.0005	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	118.000.000,00	196.000.000,00	78.000.000,00
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	814.150.000,00	952.650.000,00	138.500.000,00
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	10.000.000,00	7.200.000,00	-2.800.000,00
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	2.000.000,00	400.000,00	-1.600.000,00
5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	435.600.000,00	217.800.000,00	-217.800.000,00
5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	1.530.900.000,00	2.279.700.000,00	748.800.000,00
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	10.282.970.000,00	8.423.470.000,00	-1.859.500.000,00
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	430.200.000,00	583.200.000,00	153.000.000,00
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	1.165.800.000,00	1.165.800.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0018	Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	259.500.000,00	259.500.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0021	Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air	81.600.000,00	122.400.000,00	40.800.000,00
5.1.02.02.01.0022	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan	168.300.000,00	153.000.000,00	-15.300.000,00
5.1.02.02.01.0023	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	38.250.000,00	414.450.000,00	376.200.000,00
5.1.02.02.01.0024	Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	15.300.000,00	15.300.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	0,00	120.000.000,00	120.000.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	7.976.700.000,00	7.576.427.550,00	-400.272.450,00
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	63.300.000,00	63.300.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	807.650.000,00	1.813.092.500,00	1.005.442.500,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	1.921.100.000,00	2.246.050.000,00	324.950.000,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	1.733.850.000,00	1.861.100.000,00	127.250.000,00

KABAG
HUKUM

DINAS KEADILAN
KANTOR

AS

SEKDA

WABUP

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	168.950.000,00	305.150.000,00	136.200.000,00
5.1.02.02.01.0032	Belanja Jasa Tenaga Caraka	61.200.000,00	53.550.000,00	-7.650.000,00
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	1.023.300.000,00	1.148.300.000,00	125.000.000,00
5.1.02.02.01.0034	Belanja Jasa Tenaga Juru Masak	54.000.000,00	54.000.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	100.300.000,00	96.300.000,00	-4.000.000,00
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	24.263.600,00	33.004.185,00	8.740.585,00
5.1.02.02.01.0042	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	4.500.000,00	2.700.000,00	-1.800.000,00
5.1.02.02.01.0043	Belanja Jasa Penulisan dan Penerjemahan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	103.377.580,00	299.745.580,00	196.368.000,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	225.000.000,00	200.000.000,00	-25.000.000,00
5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	147.295.000,00	147.295.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00
5.1.02.02.01.0052	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0053	Belanja Jasa Pengukuran Tanah	100.000.000,00	50.000.000,00	-50.000.000,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	631.900.000,00	562.300.000,00	-69.600.000,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	418.498.228,00	471.535.138,00	53.036.910,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	2.471.532.307,68	2.454.227.279,68	-17.305.028,00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	3.600.000,00	900.000,00	-2.700.000,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	1.268.900.800,00	1.105.700.800,00	-163.200.000,00
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	33.265.000,00	34.765.000,00	1.500.000,00
5.1.02.02.01.0065	Belanja Penambahan Daya	557.000.000,00	352.501.300,00	-204.498.700,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	166.917.500,00	181.107.500,00	14.190.000,00
5.1.02.02.01.0068	Belanja Rekening Penerangan Jalan Umum	957.000.000,00	957.000.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0073	Belanja Medical Check Up	85.000.000,00	55.000.000,00	-30.000.000,00
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	104.500.000,00	42.000.000,00	-62.500.000,00
5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	65.960.000,00	43.540.000,00	-22.420.000,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	10.289.356.150,00	12.749.445.958,00	2.460.089.808,00
5.1.02.02.02.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	0,00	1.417.233.408,00	1.417.233.408,00
5.1.02.02.02.0003	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	2.580.693.750,00	2.580.693.750,00	0,00
5.1.02.02.02.0004	Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	7.317.542.400,00	7.317.542.400,00	0,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	0,00	639.930.000,00	639.930.000,00

KABAG HUKUM	DINAS DAN KANTOR	ASST	SEKDA	WABUP
				

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	0,00	241.755.840,00	241.755.840,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	0,00	161.170.560,00	161.170.560,00
5.1.02.02.02.0009	Belanja Pembayaran Pelayanan Kesehatan di luar Cakupan Layanan BPJS	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00
5.1.02.02.02.0012	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Pekerja Rentan	141.120.000,00	141.120.000,00	0,00
5.1.02.02.03	Belanja Sewa Tanah	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00
5.1.02.02.03.0001	Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	1.769.150.000,00	1.115.750.000,00	-653.400.000,00
5.1.02.02.04.0035	Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	858.400.000,00	693.900.000,00	-164.500.000,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	203.300.000,00	11.300.000,00	-192.000.000,00
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	198.000.000,00	0,00	-198.000.000,00
5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel	31.200.000,00	17.800.000,00	-13.400.000,00
5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	478.250.000,00	392.750.000,00	-85.500.000,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	3.918.842.000,00	1.623.928.000,00	-2.294.914.000,00
5.1.02.02.05.0006	Belanja Sewa Bangunan Kesehatan	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	3.671.842.000,00	1.344.428.000,00	-2.327.414.000,00
5.1.02.02.05.0030	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	30.000.000,00	10.000.000,00	-20.000.000,00
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	100.000.000,00	152.500.000,00	52.500.000,00
5.1.02.02.05.0050	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	3.295.000.000,00	0,00	-3.295.000.000,00
5.1.02.02.08.0006	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Rekayasa Teknik	2.050.000.000,00	0,00	-2.050.000.000,00
5.1.02.02.08.0012	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Jasa Rekayasa Konstruksi	250.000.000,00	0,00	-250.000.000,00
5.1.02.02.08.0026	Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Survei Permukaan Tanah	100.000.000,00	0,00	-100.000.000,00
5.1.02.02.08.0032	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan	895.000.000,00	0,00	-895.000.000,00
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	820.000.000,00	20.000.000,00	-800.000.000,00
5.1.02.02.09.0012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	600.000.000,00	0,00	-600.000.000,00
5.1.02.02.09.0014	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	220.000.000,00	20.000.000,00	-200.000.000,00
5.1.02.02.10	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	633.976.000,00	633.976.000,00	0,00

KABUPATEN	DEWASA	AS	SEK	WAD

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.1.02.02.10.0007	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Sistem Pengelolaan Persampahan	37.056.000,00	37.056.000,00	0,00
5.1.02.02.10.0008	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Telekomunikasi dan Informatika	112.750.000,00	112.750.000,00	0,00
5.1.02.02.10.0017	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Kesehatan	484.170.000,00	484.170.000,00	0,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	920.131.000,00	865.657.000,00	-54.474.000,00
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	191.645.000,00	165.645.000,00	-26.000.000,00
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	517.686.000,00	489.212.000,00	-28.474.000,00
5.1.02.02.12.0004	Belanja Diklat Kepemimpinan	210.800.000,00	210.800.000,00	0,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	5.696.728.345,00	3.966.882.356,00	-1.729.845.989,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.005.235.750,00	1.138.031.183,00	132.795.433,00
5.1.02.03.02.0003	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator	180.000.000,00	57.500.000,00	-122.500.000,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	305.700.000,00	195.000.000,00	-110.700.000,00
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	176.500.000,00	205.500.000,00	29.000.000,00
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00
5.1.02.03.02.0040	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	80.005.750,00	87.500.000,00	7.494.250,00
5.1.02.03.02.0049	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	0,00	5.806.183,00	5.806.183,00
5.1.02.03.02.0118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	116.630.000,00	88.875.000,00	-27.755.000,00
5.1.02.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	32.190.000,00	19.690.000,00	-12.500.000,00
5.1.02.03.02.0125	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat	4.880.000,00	0,00	-4.880.000,00
5.1.02.03.02.0237	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya	0,00	400.000.000,00	400.000.000,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	69.080.000,00	46.160.000,00	-22.920.000,00
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	22.250.000,00	14.000.000,00	-8.250.000,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	497.869.605,00	855.228.183,00	357.358.578,00

KABUPATEN	DINAS	KESS	SEKDA	WABUP

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.1.02.89.02.0002	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD Kinerja	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00
5.1.02.89.03	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP Kesetaraan	80.190.000,00	80.190.000,00	0,00
5.1.02.89.03.0001	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	80.190.000,00	80.190.000,00	0,00
5.1.02.90	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	6.917.154.000,00	6.741.044.000,00	-176.110.000,00
5.1.02.90.01	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	6.917.154.000,00	6.741.044.000,00	-176.110.000,00
5.1.02.90.01.0001	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	6.917.154.000,00	6.741.044.000,00	-176.110.000,00
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	29.916.212.651,00	32.299.231.171,00	2.383.018.520,00
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	29.916.212.651,00	32.299.231.171,00	2.383.018.520,00
5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	29.916.212.651,00	32.299.231.171,00	2.383.018.520,00
5.1.05	Belanja Hibah	7.859.290.384,00	6.143.790.384,00	-1.715.500.000,00
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	4.215.000.000,00	2.265.000.000,00	-1.950.000.000,00
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	3.615.000.000,00	1.615.000.000,00	-2.000.000.000,00
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	3.615.000.000,00	1.615.000.000,00	-2.000.000.000,00
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	600.000.000,00	650.000.000,00	50.000.000,00
5.1.05.05.02.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	600.000.000,00	650.000.000,00	50.000.000,00
5.1.05.06	Belanja Hibah Dana BOS	0,00	0,00	0,00
5.1.05.06.03	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta	0,00	0,00	0,00
5.1.05.06.03.0001	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta	0,00	0,00	0,00
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	769.295.384,00	769.295.384,00	0,00
5.1.05.07.01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	769.295.384,00	769.295.384,00	0,00
5.1.05.07.01.0001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	769.295.384,00	769.295.384,00	0,00
5.1.05.08	Belanja Hibah Dana BOSP	2.874.995.000,00	3.109.495.000,00	234.500.000,00
5.1.05.08.01	Belanja Hibah Dana BOSP-BOS	0,00	234.500.000,00	234.500.000,00
5.1.05.08.01.0001	Belanja Hibah Dana BOSP-BOS	0,00	234.500.000,00	234.500.000,00
5.1.05.08.02	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	2.579.865.000,00	2.579.865.000,00	0,00
5.1.05.08.02.0001	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	2.579.865.000,00	2.579.865.000,00	0,00
5.1.05.08.03	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan	295.130.000,00	295.130.000,00	0,00
5.1.05.08.03.0001	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan	295.130.000,00	295.130.000,00	0,00

CAKUPAN	DIKAS/DAKAM	ASS	SEKDA	WABUP

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.2	BELANJA MODAL	114.111.660.632,00	116.029.581.120,00	1.917.920.488,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	0,00	2.200.000.000,00	2.200.000.000,00
5.2.01.01	Belanja Modal Tanah	0,00	2.200.000.000,00	2.200.000.000,00
5.2.01.01.01	Belanja Modal Tanah Persil	0,00	2.200.000.000,00	2.200.000.000,00
5.2.01.01.01.0001	Belanja Modal Tanah Bangunan Perumahan/ Gedung Tempat Tinggal	0,00	1.100.000.000,00	1.100.000.000,00
5.2.01.01.01.0004	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	0,00	1.100.000.000,00	1.100.000.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	35.022.160.600,00	40.619.851.884,00	5.597.691.284,00
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	6.464.269.000,00	6.964.269.000,00	500.000.000,00
5.2.02.01.01	Belanja Modal Alat Besar Darat	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00
5.2.02.01.01.0006	Belanja Modal Asphalt Equipment	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	6.464.269.000,00	6.464.269.000,00	0,00
5.2.02.01.03.0004	Belanja Modal Electric Generating Set	1.300.000.000,00	1.300.000.000,00	0,00
5.2.02.01.03.0008	Belanja Modal Alat Pengolahan Air Kotor	3.400.000.000,00	3.400.000.000,00	0,00
5.2.02.01.03.0016	Belanja Modal Alat Bantu Lainnya	1.764.269.000,00	1.764.269.000,00	0,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	3.359.101.000,00	3.430.300.000,00	71.199.000,00
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	3.359.101.000,00	3.430.300.000,00	71.199.000,00
5.2.02.02.01.0001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	3.180.000.000,00	3.380.000.000,00	200.000.000,00
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	179.101.000,00	50.300.000,00	-128.801.000,00
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	100.000.000,00	0,00	-100.000.000,00
5.2.02.03.03	Belanja Modal Alat Ukur	100.000.000,00	0,00	-100.000.000,00
5.2.02.03.03.0001	Belanja Modal Alat Ukur Universal	100.000.000,00	0,00	-100.000.000,00
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	0,00	175.627.000,00	175.627.000,00
5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan	0,00	175.627.000,00	175.627.000,00
5.2.02.04.01.0009	Belanja Modal Alat-Alat Peternakan	0,00	175.627.000,00	175.627.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	2.508.450.640,00	3.488.262.900,00	979.812.260,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	88.300.000,00	1.282.200.000,00	1.193.900.000,00
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	55.000.000,00	0,00	-55.000.000,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	33.300.000,00	1.282.200.000,00	1.248.900.000,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	2.023.212.440,00	2.030.689.598,00	7.477.158,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	1.146.451.695,00	1.570.000.000,00	423.548.305,00
5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih	39.210.750,00	12.903.750,00	-26.307.000,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	324.786.690,00	325.636.453,00	849.763,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	447.906.910,00	97.615.000,00	-350.291.910,00
5.2.02.05.02.0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	64.856.395,00	24.534.395,00	-40.322.000,00

KABUPATEN HUMAS	DINASISDAK KANTOR	ASB	SEKDA	WABUP
				

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	396.938.200,00	175.373.302,00	-221.564.898,00
5.2.02.05.03.0001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	59.075.000,00	53.726.570,00	-5.348.430,00
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	80.121.000,00	36.866.370,00	-43.254.630,00
5.2.02.05.03.0004	Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat	35.000.000,00	6.250.000,00	-28.750.000,00
5.2.02.05.03.0005	Belanja Modal Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	9.028.600,00	16.264.686,00	7.236.086,00
5.2.02.05.03.0006	Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	201.640.000,00	43.320.000,00	-158.320.000,00
5.2.02.05.03.0007	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	12.073.600,00	18.945.676,00	6.872.076,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	10.000.000,00	255.319.000,00	245.319.000,00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	10.000.000,00	255.319.000,00	245.319.000,00
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	10.000.000,00	40.000.000,00	30.000.000,00
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	0,00	215.319.000,00	215.319.000,00
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	16.963.905.780,00	17.091.405.780,00	127.500.000,00
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	16.963.905.780,00	16.963.905.780,00	0,00
5.2.02.07.01.0001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	16.963.905.780,00	16.963.905.780,00	0,00
5.2.02.07.02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	0,00	127.500.000,00	127.500.000,00
5.2.02.07.02.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	0,00	127.500.000,00	127.500.000,00
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	2.118.107.000,00	2.227.332.000,00	109.225.000,00
5.2.02.08.03	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	2.118.107.000,00	2.097.332.000,00	-20.775.000,00
5.2.02.08.03.0005	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:IPA Menengah	170.775.000,00	150.000.000,00	-20.775.000,00
5.2.02.08.03.0015	Belanja Modal Alat Peraga PAUD/TK	1.947.332.000,00	1.947.332.000,00	0,00
5.2.02.08.08	Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	0,00	130.000.000,00	130.000.000,00
5.2.02.08.08.0006	Belanja Modal Peralatan Umum	0,00	130.000.000,00	130.000.000,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	1.682.524.280,00	1.634.039.530,00	-48.484.750,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	1.408.637.740,00	1.431.879.750,00	23.242.010,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	1.408.637.740,00	1.431.879.750,00	23.242.010,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	273.886.540,00	202.159.780,00	-71.726.760,00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	240.212.890,00	191.159.780,00	-49.053.110,00
5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	27.336.000,00	11.000.000,00	-16.336.000,00
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	6.337.650,00	0,00	-6.337.650,00
5.2.02.89	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP	445.725.000,00	3.359.070.774,00	2.913.345.774,00
5.2.02.89.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS	0,00	2.913.345.774,00	2.913.345.774,00
5.2.02.89.01.0001	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS Reguler	0,00	2.913.345.774,00	2.913.345.774,00
5.2.02.89.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOP PAUD	445.725.000,00	445.725.000,00	0,00

KABAG KUPATIM	DINASRADA KANTON	ASS	SEKDA	WABUP
------------------	---------------------	-----	-------	-------

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.2.02.89.02.0001	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOP PAUD Reguler	445.725.000,00	445.725.000,00	0,00
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	1.370.077.900,00	1.994.225.900,00	624.148.000,00
5.2.02.99.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	1.370.077.900,00	1.994.225.900,00	624.148.000,00
5.2.02.99.99.9999	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	1.370.077.900,00	1.994.225.900,00	624.148.000,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	34.947.626.032,00	40.171.305.808,00	5.223.679.776,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	33.877.626.032,00	37.305.305.808,00	3.427.679.776,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	33.594.018.032,00	35.837.703.808,00	2.243.685.776,00
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	5.047.834.000,00	3.946.500.000,00	-1.101.334.000,00
5.2.03.01.01.0002	Belanja Modal Bangunan Gudang	200.000.000,00	307.000.000,00	107.000.000,00
5.2.03.01.01.0006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	22.656.283.808,00	22.656.283.808,00	0,00
5.2.03.01.01.0008	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah	174.800.000,00	0,00	-174.800.000,00
5.2.03.01.01.0009	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	415.000.000,00	0,00	-415.000.000,00
5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	3.405.446.000,00	8.253.020.000,00	4.847.574.000,00
5.2.03.01.01.0011	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga	1.130.000.000,00	600.000.000,00	-530.000.000,00
5.2.03.01.01.0012	Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	149.754.224,00	0,00	-149.754.224,00
5.2.03.01.01.0013	Belanja Modal Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	40.000.000,00	0,00	-40.000.000,00
5.2.03.01.01.0032	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	200.000.000,00	0,00	-200.000.000,00
5.2.03.01.01.0033	Belanja Modal Bangunan Parkir	74.900.000,00	74.900.000,00	0,00
5.2.03.01.01.0036	Belanja Modal Taman	100.000.000,00	0,00	-100.000.000,00
5.2.03.01.02	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	283.608.000,00	1.467.602.000,00	1.183.994.000,00
5.2.03.01.02.0001	Belanja Modal Rumah Negara Golongan I	0,00	0,00	0,00
5.2.03.01.02.0002	Belanja Modal Rumah Negara Golongan II	0,00	619.500.000,00	619.500.000,00
5.2.03.01.02.0004	Belanja Modal Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	283.608.000,00	848.102.000,00	564.494.000,00
5.2.03.02	Belanja Modal Monumen	0,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00
5.2.03.02.01	Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	0,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00
5.2.03.02.01.0002	Belanja Modal Tugu	0,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	1.060.000.000,00	836.000.000,00	-224.000.000,00
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	1.060.000.000,00	836.000.000,00	-224.000.000,00
5.2.03.04.01.0004	Belanja Modal Pagar	1.060.000.000,00	836.000.000,00	-224.000.000,00
5.2.03.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	10.000.000,00	30.000.000,00	20.000.000,00
5.2.03.99.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	10.000.000,00	30.000.000,00	20.000.000,00
5.2.03.99.99.9999	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	10.000.000,00	30.000.000,00	20.000.000,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	43.951.874.000,00	30.720.391.000,00	-13.231.483.000,00

PAJAG HUMAS	URAS SEKRETARIS	ASS	SEKDA	WABUP

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	37.672.674.000,00	28.300.391.000,00	-9.372.283.000,00
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	23.946.177.760,00	28.300.391.000,00	4.354.213.240,00
5.2.04.01.01.0003	Belanja Modal Jalan Kabupaten	23.946.177.760,00	28.190.391.000,00	4.244.213.240,00
5.2.04.01.01.0005	Belanja Modal Jalan Desa	0,00	110.000.000,00	110.000.000,00
5.2.04.01.02	Belanja Modal Jembatan	13.726.496.240,00	0,00	-13.726.496.240,00
5.2.04.01.02.0003	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten	13.726.496.240,00	0,00	-13.726.496.240,00
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	5.669.200.000,00	1.810.000.000,00	-3.859.200.000,00
5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	230.000.000,00	0,00	-230.000.000,00
5.2.04.02.01.0002	Belanja Modal Bangunan Pengambilan Irigasi	230.000.000,00	0,00	-230.000.000,00
5.2.04.02.04	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	5.339.200.000,00	1.810.000.000,00	-3.529.200.000,00
5.2.04.02.04.0004	Belanja Modal Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	2.840.000.000,00	0,00	-2.840.000.000,00
5.2.04.02.04.0005	Belanja Modal Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai	2.499.200.000,00	1.810.000.000,00	-689.200.000,00
5.2.04.02.06	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	100.000.000,00	0,00	-100.000.000,00
5.2.04.02.06.0006	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	100.000.000,00	0,00	-100.000.000,00
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	610.000.000,00	610.000.000,00	0,00
5.2.04.03.01	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	610.000.000,00	610.000.000,00	0,00
5.2.04.03.01.0003	Belanja Modal Instalasi Air Tanah Dalam	610.000.000,00	610.000.000,00	0,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	2.204.282.428,00	2.204.282.428,00
5.2.05.89	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP	0,00	2.204.282.428,00	2.204.282.428,00
5.2.05.89.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS	0,00	2.204.282.428,00	2.204.282.428,00
5.2.05.89.01.0001	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS Reguler	0,00	2.204.282.428,00	2.204.282.428,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	190.000.000,00	113.750.000,00	-76.250.000,00
5.2.06.01	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	190.000.000,00	113.750.000,00	-76.250.000,00
5.2.06.01.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	190.000.000,00	113.750.000,00	-76.250.000,00
5.2.06.01.01.0005	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software	115.000.000,00	38.750.000,00	-76.250.000,00
5.2.06.01.01.0006	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Kajian	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00
5.3.01.01.01.0001	Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00
5.4	BELANJA TRANSFER	120.026.903.776,94	117.049.489.776,94	-2.977.414.000,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	1.473.563.122,94	1.473.563.122,94	0,00

KELOMPOK	KELOMPOK	KELOMPOK	KELOMPOK	KELOMPOK
1	2	3	4	5

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	1.236.350.798,94	1.236.350.798,94	0,00
5.4.01.01.03	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	1.236.350.798,94	1.236.350.798,94	0,00
5.4.01.01.03.0001	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	1.236.350.798,94	1.236.350.798,94	0,00
5.4.01.02	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	237.212.324,00	237.212.324,00	0,00
5.4.01.02.01	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	237.212.324,00	237.212.324,00	0,00
5.4.01.02.01.0001	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	237.212.324,00	237.212.324,00	0,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	118.553.340.654,00	115.575.926.654,00	-2.977.414.000,00
5.4.02.01	Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi	161.419.554,00	161.419.554,00	0,00
5.4.02.01.02	Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi	161.419.554,00	161.419.554,00	0,00
5.4.02.01.02.0001	Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi	161.419.554,00	161.419.554,00	0,00
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	118.391.921.100,00	115.414.507.100,00	-2.977.414.000,00
5.4.02.05.02	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	118.391.921.100,00	115.414.507.100,00	-2.977.414.000,00
5.4.02.05.02.0004	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa	69.679.459.000,00	69.679.459.000,00	0,00
5.4.02.05.02.0005	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa	48.712.462.100,00	45.735.048.100,00	-2.977.414.000,00
	Jumlah Belanja	857.706.086.308,00	797.224.057.308,00	-60.482.029.000,00
	Total Surplus/(Defisit)	-100.000.000,00	-100.000.000,00	0,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH			
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
6.1.01.07	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
6.1.01.07.01	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
6.1.01.07.01.0001	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
	Pembiayaan Netto	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00	0,00	0,00

Kab. Boalemo, 24 Maret 2025
Bupati


RUM PAGAU